



BOMBA

JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH

ISSN (Cetak): 2657 -2478
E- ISSN (Elektronik): 2715-1026



PERAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBAGAI PENYANGGA IBU KOTA NEGARA (IKN) BARU : PERSPEKTIF DISTRIBUSI LOGISTIK UNTUK KEBUTUHAN PANGAN IBU KOTA NEGARA BARU

THE ROLE OF THE GOVERNMENT OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE AS A SUPPORT FOR THE NEW IBU KOTA NEGARA (IKN): THE PERSPECTIVE OF LOGISTIC DISTRIBUTION FOOD NEEDS OF THE NEW IBU KOTA NEGARA (IKN)

Muhammad Fauzan

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
Email : muhammadfauzan@unsulbar.ac.id

Dikirim: 16/12/2022; Direvisi: 26/12/2022; Disetujui: 26/12/2022

Abstract

Ibu Kota Negara Nusantara is the new capital city for the Unitary State of the Republic of Indonesia. The relocation of the capital city has been planned since the era of President Soekarno and President Soeharto, but it was only realized in the era of President Joko Widodo. The process of moving the central of government which was previously located in DKI Jakarta to Ibu Kota Negara Nusantara, West Borneo, starting from 2024 is estimated to be completed by taking up to 25 years. The relocation of the capital city is expected to create an equitable distribution of inclusive and equitable economic growth including in Eastern Indonesia, this equalization opportunity provides benefits, especially the Central Sulawesi Province area which is located opposite each other with the new IKN. The opportunity to provide food needs for prospective IKN residents is an opportunity that can be utilized by the Government of Central Sulawesi Province and play a role in food supply. Food provision also requires logistical distribution that supports food fulfilment for prospective new IKN residents. Efforts need to be prepared to support the creation of food security from the Government of Central Sulawesi Province. This research needs to be done to see the role of the Government of Central Sulawesi Province from the point of view of logistics distribution in providing food needs in Ibu Kota Negara Nusantara, while the research method used is descriptive qualitative with data collection techniques namely literature study. The results of the research show that the Government of Central Sulawesi Province has prepared efforts to provide food needs such as the construction of a National Food Area in Donggala Regency, and for distribution channels, several channels have also been prepared to facilitate the process of distributing food logistics to reach Ibu Kota Negara Nusantara.

Keywords: Food Needs, Infrastructure, Logistic Distribution

Abstrak

Ibu Kota Negara Nusantara merupakan Ibu Kota Negara baru untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perpindahan ibu kota ini sudah direncanakan sejak era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto namun baru dapat terealisasi pada era Presiden Joko Widodo. Proses pemindahan pusat pemerintahan yang sebelumnya berada di DKI Jakarta menuju Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur, mulai dari tahun 2024 diperkirakan pemindahan selesai dengan membutuhkan waktu hingga 25 tahun. Perpindahan ibu kota ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia, peluang pemerataan ini memberikan keuntungan khususnya wilayah Provinsi

*) Penulis Korespodensi

Email : muhammadfauzan@unsulbar.ac.id

Telp : +6281316366717

© 2022 Muhammad Fauzan



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative

Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0

International.

Sulawesi Tengah yang letaknya saling berhadapan dengan IKN baru. Peluang penyediaan kebutuhan pangan untuk calon penduduk IKN merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan berperan dalam penyediaan pangan. Penyediaan pangan juga memerlukan distribusi logistik yang mendukung untuk pemenuhan pangan untuk calon penduduk IKN baru. Dibutuhkan upaya yang perlu disiapkan dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dari sudut pandang distribusi logistik dalam penyediaan kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara Nusantara, adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan upaya untuk menyediakan kebutuhan pangan seperti dibangun Kawasan Pangan Nasional di Kabupaten Donggala, dan untuk jalur distribusi juga telah disiapkan beberapa jalur untuk mempermudah proses distribusi logistik pangan hingga mencapai ke Ibu Kota Negara Nusantara.

Kata kunci: Distribusi Logistik, Infrastruktur, Kebutuhan Pangan

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang mempersiapkan perpindahan pusat pemerintahan sekaligus Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur yang tepatnya berlokasi di dua kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perwujudan pemindahan Ibu Kota Negara telah ditetapkan dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan pada tanggal 15 Februari 2022 (BPMI Setpres, 2022).

Pemindahan ibu kota telah direncanakan dari era Presiden Soekarno menjabat, pada awalnya pemindahan direncanakan berpindah dari wilayah Jakarta ke Palangkaraya yang telah disiapkan untuk menjadi ibu kota baru, namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya polemik yang terjadi pada masa saat itu. Pada akhirnya rencana pemindahan ini dapat terlaksanakan pada masa periode kedua Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memasukkan pemindahan ibu kota negara kedalam pelaksanaan proyek strategi nasional, hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur sudah merupakan rencana yang disiapkan dengan baik, pemindahan ini memiliki beberapa alasan yang menjadi acuan mengapa diperlukannya pemindahan ke wilayah diluar pulau Jawa. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bap, Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia sudah tidak dapat mengemban tugas sebagai IKN, hal ini berdasarkan performa dari wilayah tersebut yang sudah tidak optimal, hal ini didasarkan setiap tahunnya terjadi peningkatan penduduk yang sudah tidak dapat terkendali, disamping itu penurunan kualitas dan fungsi dari lingkungan menjadi alasan diperlukannya tindakan pemindahan Ibu Kota

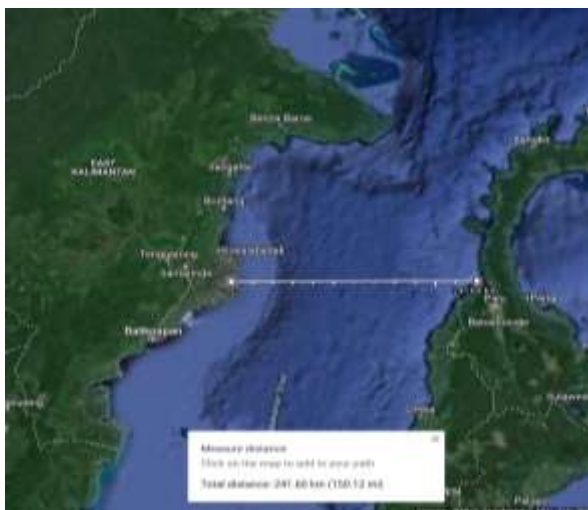
Negara (Bappenas, 2020). Rencana peralihan peran IKN ke Provinsi Kalimantan Timur menjadi harapan baru untuk Indonesia bagian Timur, dimana akan adanya pemerataan dan persebaran pertumbuhan ekonomi yang lebih baik diluar DKI Jakarta dan pulau Jawa sehingga wilayah di Indonesia dapat memiliki peningkatan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Proses pemindahan IKN memakan waktu kurang lebih 25 tahun sejak penetapan rencana pemindahan mulai dari 2020 hingga 2045, dimana tahap awal pada 2020 – 2024 dimulainya pembangunan infrastruktur utama, infrastruktur dasar, pemindahan ASN dari beberapa kementerian dan lembaga, dan diharapkan Presiden Republik Indonesia telah menempati KIKN sehari sebelum memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (Bappenas, 2021). Perpindahan Ibu Kota Negara memiliki keuntungan bagi wilayah – wilayah yang berada di Indonesia bagian Timur, hal ini didasari hasil dari pemindahan ini terhadap dampak ekonomi salah satu yang diharapkan adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Selama proses pemindahan, tentu didalamnya ada perpindahan penduduk yang menduduki wilayah IKN baru, dimana pada proses pertama, dimulai dengan pemindahan ASN dari beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan. Selain pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan aktifitas di dalam IKN baru, pemerintah perlu memperhatikan adanya kesiapan dalam memfasilitasi kebutuhan semua penduduk. Dalam pemenuhan kebutuhan yang dikonsumsi tidak terlepas dari tiga kebutuhan utama yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier (Douglas dan Isherwood, 2008). Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang dikelompokkan dalam benda baku seperti makanan dan minuman, hal ini selaras dengan kebutuhan pokok yang selalu menempati urutan teratas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan pangan bersamaan dengan kebutuhan sandang dan

kebutuhan pangan yang termasuk dalam kebutuhan pokok utama (Suryana, 2008).

Pangan adalah kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pemenuhan pangan sudah termasuk dalam bagian hak asasi bagi setiap warga negara. Pemerintah memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan pangan, mulai dari pemantauan, persediaan, hingga menyiapkan jalur distribusi pangan yang dapat pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemandangan IKN baru ini tentu menjadi keuntungan yang sangat baik bagi Pemerintah Sulawesi Tengah, tantangan dalam pemenuhan kebutuhan bagi calon penduduk IKN terutama kebutuhan pangan akan menjadi peluang peningkatan ekonomi bagi wilayah Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang posisi berseberangan langsung dengan IKN baru.



Gambar 1. Tangkapan Gambar Jarak Antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah (Google Maps, 2022).

Gambar 1 menunjukkan jarak antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana jika ditarik titik antar kedua provinsi tersebut maka jaraknya adalah 241,60 km. Jarak ini lebih dekat dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat yang berada dibagian Selatan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Keuntungan dari pemindahan IKN inilah yang perlu dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengambil peran sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara baru beserta 6 Provinsi dengan menandatangani pakta komitmen terkait dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Gubernur Provinsi Sulteng, Rusdy Mastura (2022) menyatakan persiapan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan kawasan pangan penyangga IKN yang tertuang didalam Keputusan Gubernur Sulteng Nomor

504/117.1/DBMPR-G.ST/2022, dalam keputusan disebutkan bahwa lokasi Kawasan pangan berada di desa Talaga dengan luas 1.125,3 hektar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sadar bahwa menyiapkan kebutuhan pangan tersebut diperlukan rencana yang tepat dalam proses penyediaan pangan hingga proses distribusi pangan. Sulawesi Tengah dapat menjadi kawasan penghubung dalam pemenuhan dan pemasok kebutuhan pangan ke wilayah IKN baru (Atjo, 2019) keunggulan lainnya bahwa bagian barat Sulawesi Tengah berhadapan langsung dengan IKN Nusantara yang dipisahkan oleh Selat Makassar. Hal ini dapat menjadikan wilayah Sulawesi Tengah sebagai sentra logistik pangan guna menyokong kebutuhan ibu kota negara baru (Octaviani, 2022). Jalur distribusi inilah yang dapat menjadi jembatan penghubung wilayah melalui jalur laut sebagai penyambung wilayah Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah, serta pembangunan infrastruktur untuk jalur darat dalam proses distribusi kesiapan pangan yang menghubungkan beberapa wilayah di Sulawesi Tengah yang meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada penulisan ini membahas tentang peran Pemerintah Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyangga IKN dalam pandangan perspektif distribusi logistik pangan untuk kebutuhan calon penduduk di Ibu Kota Negara baru. Harapan dari penulisan ini di antaranya adalah adanya gambaran mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memproduksi kebutuhan pangan dan prospek kesiapan jalur logistik untuk mendukung kelancaran distribusi kebutuhan pangan bagi calon penduduk di IKN baru. Tujuan dari penulisan ini guna mengeksplorasi peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempersiapkan kawasan pangan dan jalur distribusi dan kemungkinan gambaran jalur distribusi yang dapat disiapkan untuk wilayah IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penulisan yang dibuat oleh penulis ini yaitu metode kualitatif deskriptif yang merupakan metode untuk digunakan dalam penelitian dengan meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 2002). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan yang nantinya diperoleh data secara teoritis dengan mencari informasi tertulis dan sistematis dari beberapa ahli yang dapat memperluas wawasan berpikir (Rukajat, 2018). Sehingga data - data yang diperoleh adalah mengumpulkan informasi dari beberapa saluran seperti dokumen, wawancara dari

media massa, buku, dan beberapa referensi yang dapat digunakan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan manusia tidak lepas dari kebutuhan pokok yang memang menjadi konsumsi bagi setiap manusia, hal ini tidak terlepas dari salah satu kebutuhan utama manusia yaitu kebutuhan pangan, hal ini didasari bahwa pangan merupakan salah satu faktor dalam kebutuhan yang dikonsumsi setiap hari untuk mendapatkan energi dan gizi dari pangan yang dikonsumsi. Hal ini selaras dengan kebutuhan pangan yang nanti dibutuhkan untuk calon penduduk di Ibu Kota Negara baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun konsep untuk penempatan calon penduduk tersebut dilakukan secara bertahap selaras dengan pembangunan infrastruktur dan tempat tinggal, dimana diperkirakan pada tahap 1 pembangunan IKN baru dari tahun 2020 - 2024, para ASN yang berasal dari beberapa Kementerian dan Lembaga menempati wilayah IKN (Bappenas, 2021), saat ini penduduk yang menempati wilayah calon Ibu Kota Negara baru (penduduk lokal) dikisaran 100,000 jiwa, kemudian diproyeksikan adanya urbanisasi penduduk hingga mencapai 700,000 jiwa di 2025, kemudian berkembang antara 1,500,000 - 1,600,000 jiwa di 2035, dan pada 2045 diperkirakan akan tercapai penduduk di IKN dikisaran 1,700,000 - 1,900,000 jiwa (Bappenas, 2022).

Berdasarkan perkiraan meningkatnya penduduk sejalan dengan peningkatan konsumsi kebutuhan pangan pada wilayah IKN baru, maka diperlukan adanya kesiapan dalam pemenuhan kebutuhan pangan tersebut yang berasal dari wilayah - wilayah yang berdekatan dengan IKN baru. Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan pada situasi ini untuk membantu wilayah sekitar di Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah yang ditunjuk menjadi ibu kota negara baru untuk mendapatkan distribusi pangan yang lebih merata yang disertai dengan komponen - komponen pendukung dalam membangun distribusi logistik pangan yang nantinya disiapkan dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menuju wilayah Ibu Kota Negara Baru.

A. PRODUKSI PANGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Wilayah geografis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa memiliki iklim tropis, dimana suhu yang berada pada wilayah dengan iklim tersebut memiliki suhu tinggi dengan sinar matahari melimpah, curah hujan yang tinggi, serta kelembaban udara yang cenderung tinggi di atas 80 persen (Nuraini, 2021), sehingga keuntungan yang dimiliki oleh wilayah iklim tropis memiliki sumber

daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan keberlangsungan hidup manusia. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki kriteria pada iklim tropis dimana sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah yang melimpah, seperti nikel di Kabupaten Moworali dan gas cair alam di Kabupaten Luwuk, disamping hasil alam yang melimpah, produksi pangan yang cukup besar yang tersebar ke beberapa kabupaten juga dapat mendukung pemerintah dalam penyediaan pangan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki produksi pangan yang cukup besar yang berada di pulau Sulawesi.

Tabel 1.
Hasil Produksi Padi Per Provinsi di Sulawesi

Provinsi	Produksi Padi Pada Pulau	
	Produksi (ton)	
	2020	2021
SULAWESI UTARA	248,879.48	232,884.76
SULAWESI TENGAH	792,248.84	867,012.77
SULAWESI SELATAN	4,708,464.97	5,090,637.23
SULAWESI TENGGARA	532,773.49	530,029.08
GORONTALO	227,627.20	234,392.86
SULAWESI BARAT	345,050.37	311,072.46

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Tengah berada pada peringkat kedua dalam produksi padi, berdasarkan data yang cantumkan pada tabel 1 tahun 2020 produksi padi pada Provinsi Sulawesi Tengah adalah 792,249 ton, kemudian pada tahun 2021 produksi padi mengalami peningkatan sebesar 9.44% yaitu sebesar 867,013 ton, peningkatan ini cukup besar dalam kurun waktu satu tahun.

Untuk produksi beras, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 mampu memproduksi sebesar 467,000 ton dan pada tahun 2021 produksi beras mengalami peningkatan produksi sebesar 9.44% yang mencapai di angka 511,779 ton, hal ini bersamaan naik dengan naiknya produksi padi dari tahun 2020 hingga 2021.

Tabel 2.
Hasil Produksi Beras Per Provinsi di Sulawesi

Provinsi	Produksi Beras Pada Pulau	
	Produksi (ton)	
	2020	2021
Sulawesi Utara	139,854	130,866
Sulawesi Tengah	467,648	511,779
Sulawesi Selatan	2,701,888	2,921,193
Sulawesi Tenggara	305,961	304,385
Gorontalo	127,098	130,876
Sulawesi Barat	198,171	178,657

Sumber : Badan Pusat Statistik

Data dari Badan Pusat Statistik mengenai produksi padi serta beras untuk Sulawesi Tengah untuk tahun 2020 dan 2021 kemungkinan mengalami peningkatan pada tahun ini mengingat saat ini memasuki penghujung waktu tahun 2022 sehingga belum ada data yang valid untuk disertakan pada penulisan ini. Selain padi dan beras, produksi Jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan juga perlu diperhatikan, untuk Sulawesi Tengah di pulau Sulawesi produksi Jagung yang dimiliki tidak sebanyak seperti wilayah yang berada di pulau Sulawesi.

Tabel 3.
Hasil Produksi Jagung Per Provinsi di Sulawesi

Provinsi	Produksi Jagung Pada Pulau Sulawesi (Ton)	
	2015	2017
SULAWESI UTARA	300,490	1,636,236
SULAWESI TENGAH	131,123	374,323
SULAWESI SELATAN	1,528,413	2,341,336
SULAWESI TENGGARA	68,141	172,078
GORONTALO	643,512	1,551,972
SULAWESI BARAT	100,811	724,222

Sumber : Badan Pusat Statistik

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi Jagung yang berasal dari provinsi Sulawesi Tengah masih cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berada di pulau Sulawesi, pada tahun 2015 produksi jagung berada di angka 131,123 ton, kemudian mengalami peningkatan sebesar 1,85% pada tahun 2017, jumlah produksi jagung mencapai 374,323.

Selain tanaman pangan padi dan jagung, provinsi Sulawesi Tengah juga mampu memproduksi tanaman pangan kedelai. Kedelai merupakan salah satu produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia terutama kedelai merupakan bahan baku utama dalam pembuatan tempe. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kedelai, pada tahun 2016 tercatat produksi kedelai sebesar 15,358 ton, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan di kisaran angka 27,691 untuk produksi kedelai yang berasal dari provinsi Sulawesi Tengah yang dapat di artikan mengalami peningkatan sebesar 1,24%.

Tabel 4.
Hasil Produksi Kedelai Per Provinsi di Sulawesi

Provinsi	Produksi Kedelai (Ton)	
	2016	2018
SULAWESI UTARA	15,859	50,026
SULAWESI TENGAH	15,358	27,691
SULAWESI SELATAN	62,054	35,824
SULAWESI TENGGARA	16,136	8,007
GORONTALO	3,911	3,257
SULAWESI BARAT	6,480	15,091

Sumber : Badan Pusat Statistik

Provinsi Sulawesi Tengah juga mampu memproduksi tanaman pangan lainnya seperti kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar sehingga tanaman pangan yang dimiliki bervariasi dan cukup menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan pangan baik pada masyarakat di Sulawesi Tengah maupun untuk calon penduduk di Ibu Kota Negara baru. Kacang tanah yang dapat diproduksi pada tahun 2018 oleh provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,366 ton dan menempatkan posisi kedua untuk tanaman pangan jenis kacang tanah, kemudian untuk kacang hijau sendiri, wilayah dengan ibu kotanya adalah Kota Palu ini sendiri dapat memproduksi sebesar 585 ton.

Tabel 5.
Hasil Produksi Beras Per Provinsi di Sulawesi.

Provinsi	Produksi Tanaman Pangan Lainnya Tahun 2018			
	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
SULAWESI UTARA	2,442	465	41,651	20,851
SULAWESI TENGAH	3,366	585	48,405	15,464
SULAWESI SELATAN	19,152	22,000	422,601	52,213
SULAWESI TENGGARA	2,606	777	209,159	24,753
GORONTALO	341	13	2,781	415
SULAWESI BARAT	391	480	22,174	8,044

Sumber : Badan Pusat Statistik

Produksi pangan umbi – umbian seperti ubi kayu dan ubi jalar memiliki jumlah yang cukup besar, misalnya pada produksi ubi kayu terdapat 48,405 ton yang dapat dihasilkan dari wilayah provinsi tengah, disamping itu untuk produksi pangan ubi jalar yang dapat diproduksi ialah sebesar 15,464 ton.

Hasil produksi tanaman pangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan kebutuhan pangannya untuk dapat mencapai ketahanan pangan bagi masyarakat provinsi Sulawesi Tengah maupun untuk wilayah ibu kota negara baru, oleh sebab itu, wilayah Sulawesi Tengah telah ditetapkan sebagai kawasan Strategis Pengembangan Pangan Nasional, hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura pada rapat pengembangan kawasan pangan nasional (KPN) (2022).

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan dari pemerintah daerah yang berperan sebagai tonggak utama dalam pemberian dukungan untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga menjadi

ketahanan pangan bagi wilayah ibu kota negara baru.

B. KAWASAN STRATEGIS PANGAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN DI IBU KOTA NEGARA BARU

Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura telah mencanangkan program nasional yaitu Kawasan Pangan Nasional (KPN) yang bertujuan sebagai penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur (Izfaldi, 2022). Program nasional ini telah ditetapkan didalam Surat Keputusan Gubernur Nomor: 504/117/.1/DBMPR-G.ST/2022 tentang Penetapan Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala sebagai Kawasan Pangan Nasional (KPN) Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional yang ditandatangani pada 28 Maret 2022.

Lokasi untuk KPN dikuatkan dengan rekomendasi Kawasan Pangan Nusantara Nomor : 504/71/Bappeda, adapun lahan yang telah disiapkan oleh Pemprov Sulawesi Tengah yaitu di Desa Talaga, Kabupaten Donggala yang berada pada posisi bagian utara dari Kota Palu dengan luas dari lokasi tersebut mencapai 1.123,59 Ha (Izfaldi, 2022). Pembangunan KPN ini tentu bukan dikarenakan keinginan pemprov, namun ini merupakan bentuk dukungan penuh dari pemerintah pusat bahwa Pemprov Sulteng mampu menjawab tantangan untuk mendukung pembangunan dengan menyiapkan lahan sebagai penyangga kebutuhan pangan di IKN.

Kawasan Pangan Nasional yang berlokasi di Kabupaten Donggala menggunakan skema konservasi pada lahan bukaan baru (Ridwan, 2022). Hal ini guna untuk menjaga lingkungan disekitaran kawasan tersebut guna menjaga kelangsungan lingkungan hidup dan secara tidak langsung kawasan pertanian juga merasakan dampak konsevasi, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah, Nelson Metubu. Selain itu, lahan bukaan baru juga hanya digunakan untuk menanam tanaman subsektor yakni Jagung dan Kedelai yang dapat ditanam diantara tegakan pohon.

Kawasan pada Desa Telaga dapat dikembangkan komoditas subsektor tanaman pangan, kesiapan lahan yang telah disiapkan adalah sebesar 493 Ha yang ditanam khusus tanaman jagung dan kedelai dan kemudian untuk tanaman hortikultura seluas 165 Ha (Nelson, 2022). Hal ini selaras dengan produksi untuk komoditi Jagung dan Kedelai yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah yang perlu ditingkatkan, sehingga perlunya penambahan wilayah untuk meningkatkan produktifitas dari komoditi subsektor tersebut.

Pemerintah pusat juga mendorong Pemprov Sulawesi Tengah untuk meningkatkan produksi beras, menurut Nelson pada tahun 2018, Sulawesi Tengah surplus beras sekitar 90,000 ton, sehingga perlunya peningkatan produksi dengan dukungan program Indeks Pertanaman 400 (IP400). IP400 merupakan program yang implementasinya menggunakan dua strategi, yaitu rekayasa teknologi dan rekayasa sosial yang tujuannya untuk mengoptimalkan wilayah pengembangan dengan memanfaatkan ruang dan waktu agar indeks pertanaman menjadi maksimal sehingga produksi serta pendapatan para petani akan meningkat (BB Padi, 2009). Rencana implementasi program IP400 ini diharapkan mengalami surplus beras mencapai 180,000 ton sehingga diperkirakan Sulawesi Tengah dapat menyiapkan kebutuhan pangan minimal 30 hingga 40 persen untuk kebutuhan Ibu Kota Negara Nusantara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Strategis Pangan Nasional, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perlu untuk menyiapkan luasan areal untuk kawasan pengembangan yang diharapkan seluas 20,000 Ha, oleh sebab itu, menurut Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Christina Shandra Tobondo mengatakan Pemprov Sulawesi Tengah perlu menyiapkan beberapa wilayah pengembangan, seperti di Kabupaten Donggala diperlukan penambahan kawasan selain dari Desa Talaga yang berada di Kecamatan Dampelas yang meliputi Sirenja dan Pinembani yang diperkirakan luas area 18,823 Ha, selanjutnya dari Kabupaten Sigi yaitu wilayah Karavana, Bangga, Sibalaya, Sidera, dan Jonooge dengan total luas 2,180 Ha, dan terakhir wilayah Manggalapi dengan luas 1,976 Ha.

Persiapan Kawasan Strategis Pangan Nasional ini tentunya diperlukan adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur terutama pembangunan jalur distribusi yang dapat mempermudah distribusi logistik untuk pangan sehingga jalur – jalur yang dilalui perlu dibangun infrastruktur yang dapat terintegrasi antar wilayah sehingga proses dari distribusi tersebut dapat tersalurkan dengan lancar mulai dari kawasan pangan hingga sampai ke ibu kota negara baru yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi calon penduduk di wilayah tersebut.

C. PERSIAPAN JALUR DISTRIBUSI LOGISTIK UNTUK PENDISTRIBUSIAN PANGAN HINGGA IBU KOTA NEGARA BARU

Pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur merupakan suatu berkah atau keuntungan bagi Sulawesi Tengah, hal ini perlu disyukuri karena letak geografis antara posisi ibu kota negara baru dengan wilayah Sulawesi Tengah yang sangat strategis yang saling berhadapan langsung yang

hanya dipisahkan dengan Selat Makassar. Pembangunan infrastruktur ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat yang berupa jembatan dan jalan yang diharapkan dapat memberikan aksesibilitas dalam distribusi logistik pangan yang berasal dari kawasan – kawasan pangan yang telah disiapkan sampai menuju tempat pelabuhan.

Letak dari Provinsi Sulawesi Tengah dengan lokasi yang strategis dimana berada di tengah – tengah Indonesia serta dilintasi garis khatulistiwa sehingga dinilai bisa menjadi sentra logistik pangan mulai dari beras, sayur mayur, ikan, daging, telur, dan komoditas perkebunan lainnya, selain itu wilayah Sulawesi Tengah dapat menjadi wilayah dengan jalur perhubungannya dapat menghubungkan daerah – daerah lainnya salah satunya untuk mendukung kelancaran distribusi logistik pangan ke daerah Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur dalam penguatan konektivitas antar daerah dapat memberikan kemudahan dalam proses distribusi, mempersiapkan jalur distribusi tersebut mulai dari darat hingga laut perlu adanya peningkatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah sedang mempersiapkan infrastruktur seperti jalan dan jembatan untuk menghubungkan wilayah – wilayah Kawasan Pangan Nasional yang mendukung produksi tanaman pangan. Ada beberapa wilayah yang dipersiapkan untuk terhubungnya jalan antar wilayah, seperti Desa Bangga di Kabupaten Sigi yang menghubungkan Desa Watanu yang berada di Kabupaten Donggala, selain itu Desa Tambu di Pante Barat Kabupaten Donggala yang perlu pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Desa Kasimbar dari Kabupaten Parigi Moutong (Kompas, 2022).

Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang berlangsung pembangunan infrastruktur guna mempercepat distribusi logistik yang dipergunakan untuk pengiriman hasil dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta peternakan (Antarnews, 2022). Sejak DPR – RI menyetujui Rancangan Undang – Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang – Undang, Gubernur Sulawesi Tengah merespon dengan menyatakan Provinsi Sulawesi Tengah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada distribusi logistik ke Kalimantan Timur untuk mendukung pembangunan IKN (Mastura, 2022). Hasil – hasil seperti pertanian, kelautan dan kehutan dari Sulawesi Tengah memiliki masalah pada distribusi sehingga produk – produk hasil dari komoditi yang dimiliki Sulawesi Tengah lambat sampai dipasar.

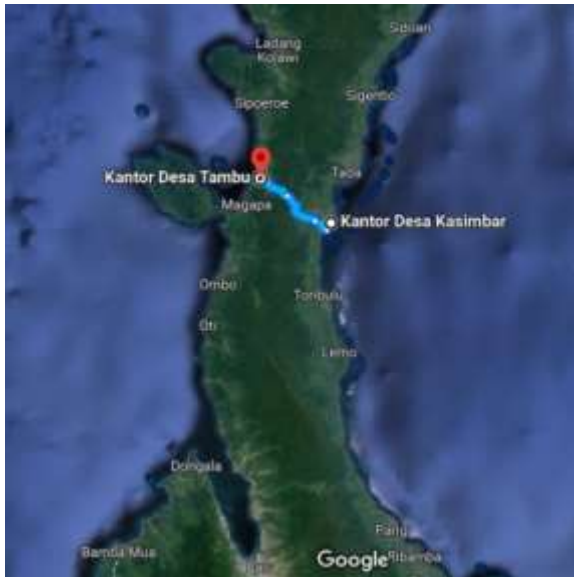


Gambar 2. Tangkapan Gambar Jarak Antara Kota Palu, Desa Bora, Desa Pakuli, dan Desa Bangga (Google Maps, 2022).

Pembangunan infrastruktur yang sedang dibangun antara lain jalan yang menghubungkan Kota Palu dengan Desa Bora, Kabupaten Sigi yang kemudian jalan yang menghubungkan Desa Bora dengan Desa Pakuli yang masih berada pada kabupaten yang sama. Desa Pakuli berdekatan dengan Desa Bangga yang juga menjadi salah satu perencanaan pembangunan jalan untuk distribusi logistik yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Jika dilihat pada jarak antara Kota Palu hingga Desa Bangga, Kabupaten Sigi berjarak sekitar 52,6km dengan waktu jarak tempuh hingga 1 jam 30 menit, jika dilihat dari jarak antar wilayah dan waktu tempuh seharusnya dapat ditempuh kurang dari waktu yang ada saat ini, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh yang nantinya akan memberikan dampak pada penghematan waktu pengiriman serta biaya yang dikeluarkan.

Terhubungnya wilayah antara Desa Tambu, Kabupaten Donggala dengan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong juga termasuk salah satu prioritas pembangunan infrastruktur untuk distribusi logistik yang memiliki jarak antar kedua wilayah yaitu 30km yang mana pembangunan jalan dan jembatan menjadi bagian dari infrastruktur yang diperlukan untuk menghubungkan kedua wilayah tersebut. Akses yang disiapkan oleh pemerintah memberikan dampak yang sangat positif dalam memudahkan distribusi logistik, Parigi Moutong merupakan salah satu wilayah dengan komoditi tanaman pangan dan kelautan yang melimpah, salah satunya adalah beras yang merupakan produksi pangan unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Parigi Moutong, pembangunan jalur ini tentu dapat menghubungkan bagian utara dari Provinsi Sulawesi Tengah antara wilayah Timur dengan Wilayah Barat.



Gambar 3. Tangkapan Gambar Jarak Antara Desa Tambu dengan Desa Kasimbar (Google Maps, 2022).

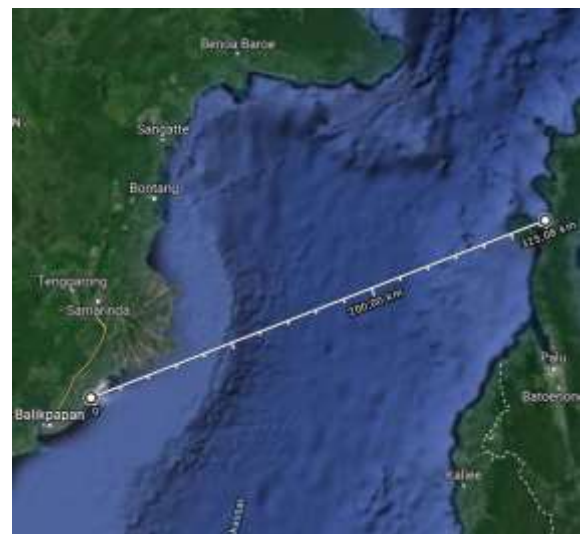
Akses - akses yang menghubungkan wilayah Tambu dan Kasimbar memberikan kemudahan dalam mendistribusikan produk pangan yang berasal dari Parigi Moutong sehingga jalur keluar - masuk logistik semakin mudah dan juga memberikan peningkatan keuntungan bagi daerah (Antarnews, 2022).

Pada Gambar 3 menunjukkan jarak antara kedua wilayah yang menghubungkan bagian timur dan barat pada Sulawesi Tengah yang terhubung sehingga memberikan kemudahan akses untuk distribusi maupun dapat dimanfaatkan dan memudahkan masyarakat yang berasal dari wilayah barat menuju wilayah timur ataupun sebaliknya. Jembatan penghubung yang dapat dibangun adalah jalan Tol Tambu - Kasimbar (Atjo, 2019), Menurut mantan Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Bapak Hasanuddin Atjo, pembangunan Tol Tambu - Kasimbar ini memberikan kemudahan akses dalam pendistribusian kebutuhan pangan yang nantinya memangkas waktu pengiriman, jika melihat pada Gambar 3 waktu tempuh saat ini mencapai 50 - 60 menit, namun dengan dibangunnya akses tol antara tambu dan kasimbar maka waktu tempuh dapat dipangkas hingga 50%, sehingga bisa meningkatkan efisiensi hingga 40% dibanding melalui jalur reguler (Atjo, 2019).

Pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk distribusi logistik ini juga perlu adanya pembangunan selain jalan dan jembatan, dukungan pemerintah untuk mendistribusikan komoditi tanaman pangan yang dimiliki Sulawesi Tengah ke wilayah Kalimantan Timur, diperlukan pembangunan infrastruktur untuk transportasi laut yaitu pelabuhan. Sulawesi Tengah saat ini memiliki tiga pelabuhan, yaitu Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Wani, dan Pelabuhan Donggala, pasca gempa pasigala yang terjadi pada tahun 2018

mengalami kerusakan yang berdampak dari bencana alam tersebut.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut menyatakan berkomitmen untuk memperbaiki ketiga pelabuhan tersebut agar mobilitas penduduk dan distribusi logistik dapat berjalan dengan baik. Distribusi logistik dari ketiga pelabuhan ini diperlukan untuk mendukung wilayah Sulawesi Tengah sebagai penyangga kebutuhan pangan di ibu kota negara baru. Pelabuhan Donggala yang bertempat di wilayah Tambu ini akan menjadi salah satu pendukung dalam proses distribusi tanaman pangan yang berasal dari wilayah barat Sulawesi Tengah yaitu Parigi Moutong.

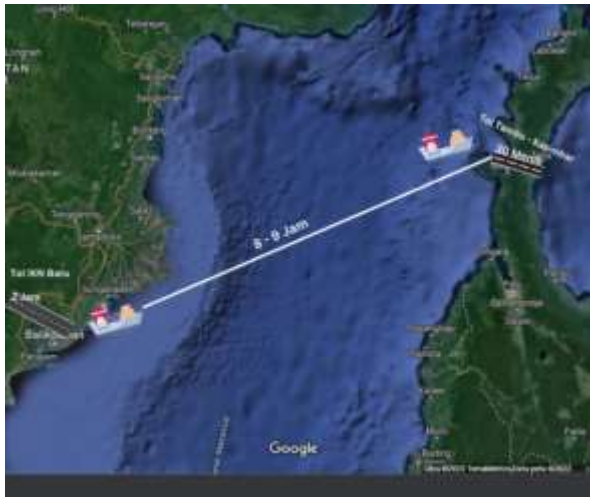


Gambar 4. Tangkapan Gambar Jarak Wilayah Tambu dengan Kota Balikpapan (Google Maps, 2022).

Sulawesi Tengah dapat menjadi jembatan penghubung antara ibu kota negara baru dengan wilayah Timur Indonesia dan dapat menjadi penghubung antara ALKI II dan ALKI III (Atjo, 2019). Selain dapat mendukung logistik dari wilayah barat dari Sulawesi Tengah, hal ini juga akan mendukung terbukanya jalur baru yang menghubungkan wilayah Indonesia Timur, sehingga distribusi yang berasal seperti dari wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua dapat menggunakan jalur 'Tol Tampu - Kasimbar' distribusi logistik. Menurut Bapak Hasanuddin Atjo juga diperlukan peningkatan infrastruktur dari pelabuhan kasimbar untuk menerima logistik dari wilayah Indonesia Timur.

Simulasi yang dilakukan oleh mantan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah ini menggambarkan bagaimana Tol Tambu - Kasimbar ini dapat memberikan kemudahan akses logistik, misalnya pengiriman tanaman pangan yang berasal dari Parigi Moutong menggunakan transportasi darat dan melewati tol Tambu - Kasimbar hingga tiba di Pelabuhan Tambu, selanjutnya diangkut menggunakan kapal ferry hingga tiba di pelabuhan Balikpapan yang kemudian melanjutkan perjalanan

menuju ibu kota negara baru untuk mendistribusikan kebutuhan pangan ke penduduk disana. Perkiraan waktu tempuh antara Pelabuhan Tambu menuju Pelabuhan Balikpapan diperkirakan 8 - 9 jam, jika ditotalkan mulai dari wilayah Kasimbar hingga tiba di IKN, maka total waktu tempuh diperkirakan antara 12 jam.



Gambar 5. Simulasi Distribusi Logistik Menuju IKN Baru (Google Maps, 2022).

Simulasi ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Sulawesi Tengah dapat melakukan pembangunan infrastruktur distribusi logistik yang memadai guna tercapainya distribusi yang mudah di akses dan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Atjo, 2019). Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan bahwa konektivitas antar wilayah sangat dibutuhkan sehingga pembangunan infrastruktur yang menyambung antar daerah sangat diperlukan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan melalui dana APBD yang nilainya kurang lebih mencapai Rp. 700 Milliar. Selain menggunakan dana APBD, Bapak Rusdi Mastura telah bermohon kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Agung, dalam penyampaian Gubernur Sulawesi Tengah bahwa diperlukannya usulan dana untuk percepatan pembangunan infrastruktur wilayah Sulawesi Tengah dengan usulan sebesar Rp. 5 Triliun dengan jangka waktu pembangunan selama lima tahun.

IV. KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan siap menjadi wilayah penyangga untuk Ibu Kota Negara Nusantara yang berada di Kalimantan Timur, hal ini dibuktikan dengan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan mereka dengan membangun Kawasan Pangan Nasional yang tersebar di beberapa wilayah yang berada di Sulawesi Tengah. Selain itu, Pemprov juga dengan sigap menyiapkan pembangunan infrastruktur

untuk mendukung distribusi logistik untuk kebutuhan pangan yang nantinya dikirimkan ke ibu kota negara baru dengan menyiapkan jalan serta jembatan merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah bahwa pembangunan ini merupakan salah satu cara untuk mempercepat pembangunan di IKN serta meningkatkan perekonomian di Sulawesi Tengah. Selain itu, dukungan dari Pemerintah Pusat juga sangat diperlukan untuk melancarkan pembangunan infrastruktur ini, sehingga percepatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti dalam hal ini mengakui masih banyaknya kekurangan dalam penyampaian data untuk mendukung penelitian yang dilaksanakan, namun peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya atas dukungan yang telah diberikan baik itu bantuan dan petunjuk dari pihak - pihak yang mendukung peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Selain itu juga ucapan terima kasih ditujukan kepada tim Balitbangda Provinsi Sulawesi Tengah yang memberikan kesempatan peneliti untuk dapat memberikan sumbangsih untuk pembangunan Sulawesi Tengah agar dapat menjadi wilayah yang lebih maju dan unggul baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2021). Analisis Produktivitas Jagung dan Kedelai di Indonesia 2020 Hasil Survei Ubinan). Jakarta.: Badan Pusat Statistik.
- Freightsight.com. (2022, 21 Januari). Pemprov Sulteng Utamakan Pembangunan Infrastruktur Untuk Distribusi Logistik ke IKN. Diakses 1 Desember 2022, dari <https://freightsight.com/article/pemprov-sulteng-utamakan-pembangunan-infrastruktur-untuk-distribusi-logistik-ke-ikn/>
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan atukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformatif*, 8(1). DOI: 10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1.
- Khairi, N., dkk. (2020). Dampak Kependudukan Terhadap Berkelanjutan Pangan. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, Vol.2/2020.
- Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group.
- Nugroho, H. (2020). Pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Ke Kalimantan Timur : Strategi Pemenuhan Kebutuhan dan Konsumsi Energi. *Bappenas Working Papers*, Vol III No. 1 - Maret 2020.

- Salmiya, dkk. (2022). Distribusi dan Logistik Hasil Tangkapan Nelayan (Studi Kasus Pada Pelabuhan Perikanan Puger Jember). *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, Vol. 4 No. 1 Mei 2020.
- Saputra, S. D. dkk (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara). *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021.
- Sultengprov.go.id. (2022, 13 Juli). Gubernur: KPN dan Food Estate Menjadi Salah Satu Prioritas Strategis Nasional. Diakses 28 November 2022, dari <https://sultengprov.go.id/gubernur-kpn-dan-food-estate-menjadi-salah-satu-prioritas-strategis-nasional/>
- Supriatne, A. (2012). Meningkatkan Indeks Pertanaman Padi Sawah Menuju IP Padi 400. *Agrin* Vol. 16, No. 1, April 2012.
- Trilogi.co.id. (2019, 3 Agustus). Ibu Kota Baru, Hasanuddin Atjo: Sulteng Jadi Jembatan Kawasan Timur Indonesia. Diakses 28 November 2022, dari <https://trilogi.co.id/ibu-kota-baru-hasanuddin-atjo-sulteng-jadi-jembatan-kawasan-timur-indonesia/>
- Widodo, H. dkk. (2013). Perencanaan Pembangunan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat (Studi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi). *Wacana*, Vol. 16, No. 4.